

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya dana yang diterima oleh pemerintah berasal dari masyarakat. Masyarakat yang telah memberikan kewajibannya kepada Negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai institusi Negara yang mengelola dana tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaannya untuk membangun maupun memperbaiki infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik pemerintah membutuhkan sebuah perencanaan anggaran yang baik sehingga dapat menggambarkan keseimbangan antara pembelanjaan, pendapatan yang diterima, maupun pembiayaan yang diinginkan.

Sasongko dan Parulian (2015:2) berpendapat bahwa anggaran adalah suatu kegiatan yang disusun secara sistematis oleh manajemen selama satu periode terutang secara kuantitatif. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang didasarkan atas perencanaan kinerja yaitu program dan kegiatan, berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2002).

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah bahwa fungsi anggaran di lingkup pemerintah mempunyai pengaruh penting karena:

1. Anggaran merupakan pertanyaan kebijakan publik
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum
4. Anggaran memberikan penilaian kinerja pemerintah

5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Sistem anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Menurut Izzaty (2012) tujuan anggaran berbasis kinerja adalah untuk mengatasi kelemahan dari anggaran tradisional. Penggunaan anggaran berbasis kinerja mampu mengubah arah penggunaan dana dari pemerintah yang semula berorientasi pada input, tetapi sekarang sudah berorientasi pada output. Pendekatan penganggaran yang berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik.

Good Financial Governance (tata kelola keuangan pemerintah yang baik) adalah merencanakan, mengorganisasikan dan mengontrol kegiatan keuangan demi mengimbangi penghasilan dan pengeluaran individu maupun organisasi yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan agar terhindar dari kondisi dimana pengeluaran lebih besar dari pemasukan.

Pengelolaan keuangan haruslah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yaitu adanya partisipasi masyarakat, adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, adanya keadilan dalam pengelolaan anggaran agar tidak ada penyalahgunaan anggaran seperti korupsi yang dapat merugikan masyarakat karena dana yang seharusnya dianggarkan untuk kepentingan publik telah disalahgunakan oleh para pemegang kewenangan di instansi pemerintahan.

Sebagai gambaran atas kerugian yang ditanggung negara, jumlah uang ganti rugi per 31 desember 2006 yang didasarkan putusan pengadilan dan penetapan BPK (badan pemeriksa keuangan) telah mencapai Rp 8,198 triliun dan USD 376 juta. Pihak yang harus membayar ganti rugi itu ialah bendahara, pegawai negara bukan bendahara, serta pihak ketiga yang tersedia diberbagai instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN. Untuk kriteria instansi pemerintah terdapat 378 kasus dilingkungan pemerintah pusat, daerah BUMN

dan total ganti kerugian adalah Rp 137,5 miliar dan USD 960.100 dan telah diselesaikan sebanyak 96 kasus senilai Rp 873,8 juta. Adapun kriteria pegawai negeri yang bukan bendahara terdapat 3.306 kasus senilai Rp 395,5 miliar dan USD 4,1 juta dan telah selesai Rp 5,4 miliar. Untuk kriteria pihak ketiga terdapat 2.092 kasus senilai Rp 9,498 triliun dan USD 371 juta. Data BPK (badan pemeriksa keuangan) menjelaskan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ditemukan sekitar 191.575 kasus penyimpangan senilai Rp 103,19 triliun yang hingga tahun 2011 baru bias diselesaikan 55,3 persen. Sementara 23,4 persen diantaranya belum ditindaklanjuti dan bahkan tidak bias ditindaklanjuti dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 24,91 triliun (Karianga, 2017:73).

Gambaran kasus diatas menjelaskan bahwa kerugian yang ditanggung oleh negara akibat penyalahgunaan keuangan cukup besar. Jika kasus penyalahgunaan anggaran tidak ada, maka dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan yang dikelola oleh pemerintah.

Kecamatan koja adalah pusat administratif yang berada di wilayah Jakarta Utara khususnya daerah koja. Penulis tertarik ingin menjadikan kecamatan koja sebagai objek penelitian karena, di wilayah Koja Jakarta Utara termasuk wilayah yang banyak melakukan pembangunan publik, diantaranya adalah posko pemadam kebakaran di halaman kantor Kecamatan Koja, musholla yang berada satu gedung dengan posko pemadam, pembangunan dan peninggian jalan ditengah permukiman, pembangunan puskesmas, dan pembangunan trotoar. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus direncanakan secara matang dan tata kelola keuangannya juga harus diterapkan secara baik agar dana yang masuk dapat bermanfaat dan digunakan sesuai dengan yang semestinya untuk pembangunan-pembangunan tersebut. Penulis ingin mengetahui dan meneliti apakah penerapan anggaran berbasis kinerja diterapkan dengan baik dan bagaimana tata kelola keuangan di Kecamatan Koja dalam mensejahterakan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan tersebut.

Penyusunan anggaran merupakan salah satu bagian yang penting dalam sistem akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik. Lembaga pemerintahan

awalnya menerapkan sistem anggaran tradisional namun dalam praktiknya, sistem anggaran tradisional ini kurang efektif karena penyusunan anggaran hanya berdasarkan anggaran tahun sebelumnya dan hanya berorientasi pada input, cara penyusunan anggaran tradisional tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih berdasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran sistem anggaran yang awalnya menggunakan anggaran tradisional, kini beralih kepada sistem anggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja ini berorientasi pada *input*, *output* dan *outcome*. Anggaran merupakan alat pengawasan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja harus benar-benar diterapkan dalam pemerintahan karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan anggaran tradisional.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik ingin meneliti tentang penerapan anggaran yang berjudul “Evaluasi penerapan anggaran berbasis kinerja dan tata kelola keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Koja Jakarta Utara”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimna penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Kecamatan Koja Jakarta Utara?
2. Bagaimana tata kelola keuangan di Kecamatan Koja Jakarta Utara?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Koja Jakarta Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja di Kecamatan Koja Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola keuangan di Kecamatan Koja Jakarta Utara.

3. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Koja Jakarta Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pihak intern maupun ekstern yaitu:

1. Bagi penulis

Pengembangan penelitian bermanfaat bagi penulis karena dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang penerapan anggaran pemerintahan yang modern.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena pengetahuan mereka bertambah dalam menilai kinerja pemerintahan yang selama ini tidak mereka ketahui. Sehingga masyarakat dapat mengkritik jika kinerja pemerintahan tersebut kurang baik.

3. Bagi lembaga pemerintahan khususnya Kecamatan Koja Jakarta Utara

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan tentang anggaran berbasis kinerja kepada lembaga pemerintahan karena dengan penerapan anggaran ini lebih efektif dan efisien. Sehingga, mereka dapat bekerja secara maksimal dan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

4. Bagi lembaga STEI

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah koleksi skripsi yang ada di STEI sehingga dapat dibaca dan dikembangkan oleh mahasiswa STEI yang ingin melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini diharapkan cakupan penelitiannya diperluas lagi tidak hanya Kecamatan, agar dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk serentak menerapkan anggaran berbasis kinerja bagi lembaga pemerintahan.